

SEMINAR AKHIR PENELITIAN TA. 2021

KEMANFAATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEBAGAI SIMPUL PELAYANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI TINGKAT KECAMATAN

**Iwan Setiajie Anugrah
Mat Syukur
Tri Pranadji
Sri Wahyuni
Kurnia Suci Indraningsih
Sri Hastuti Suhartini
Herlina Tarigan
Cut Rabiatul Adawiyah
Joko Mulyono
Hari Hermawan**



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**



Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Kementan, 2018). → Mengatur kelembagaan Penyuluhan Pertanian, baik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swadaya maupun oleh pihak swasta.

Pelaksanaan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (Kementan 2019).

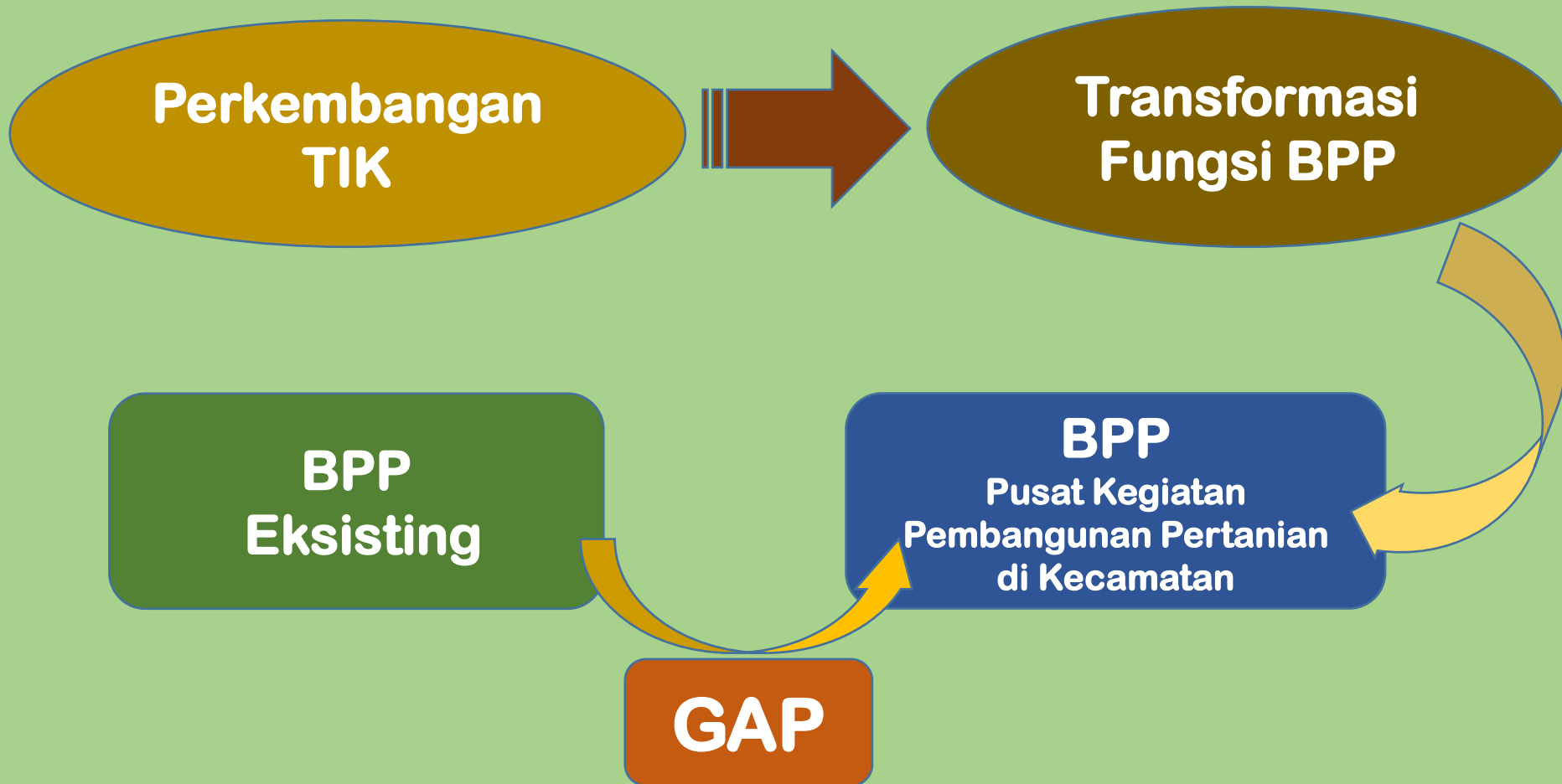
Program pembangunan pertanian strategis nasional → kerangka kerja Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan) → melibatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan di tingkat Kecamatan melalui gerakan Komando Strategis Pertanian di Kecamatan (Kostratani) → Permentan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020

Kostratani → mengoptimalkan peran BPP sebagai pusat data dan informasi; pusat gerakan pembangunan pertanian; pusat pembelajaran; pusat konsultasi agribisnis; dan pusat pengembangan jejaring kemitraan;



PENDAHULUAN

Dasar Pertimbangan



TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum penelitian

Merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan tugas, fungsi dan peran BPP dalam rangka mewujudkan pengelolaan program strategis pembangunan pertanian di kecamatan, dan mendukung gerakan/program Kostratani.

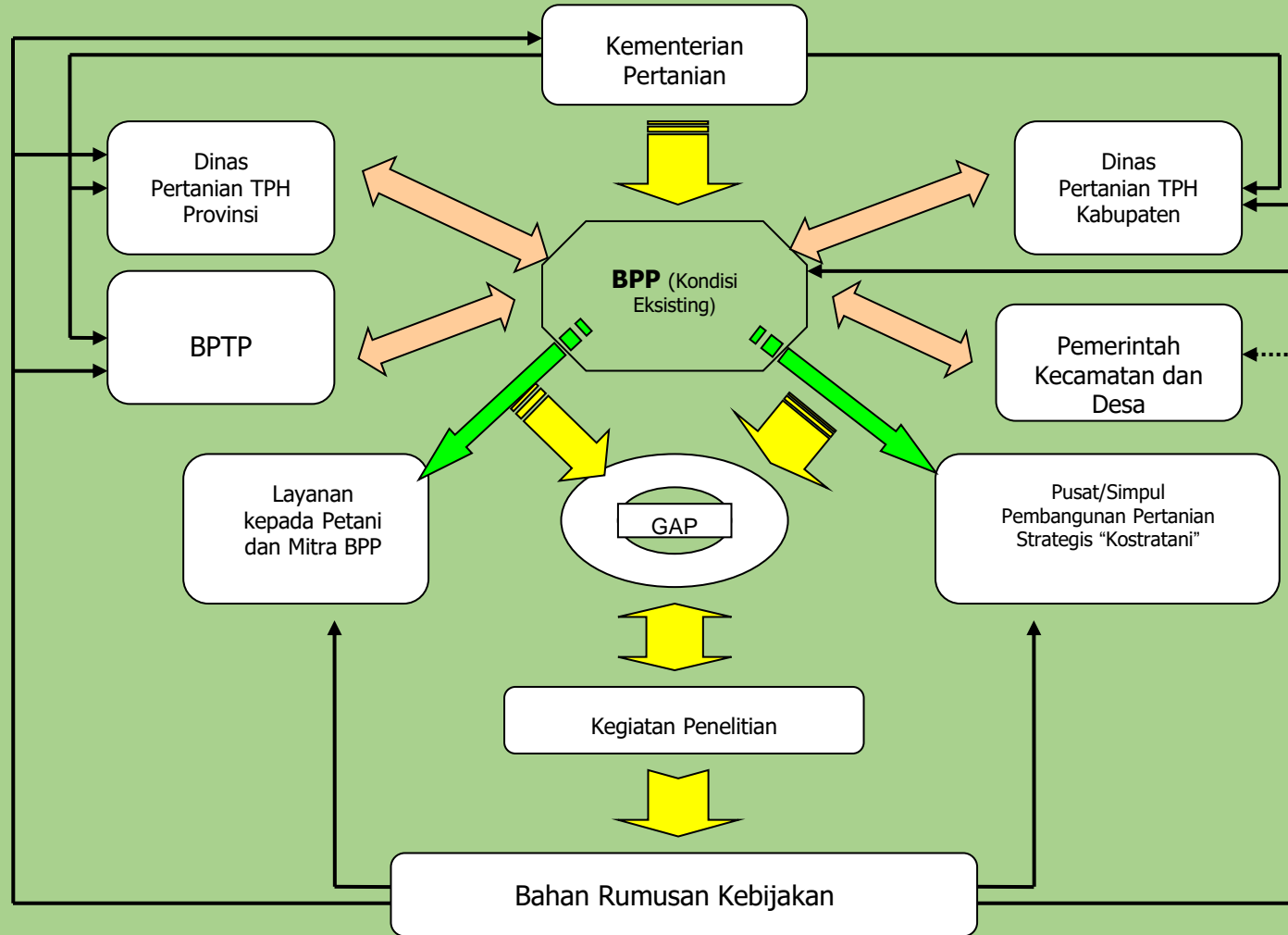
Tujuan penelitian spesifik

1. Mengidentifikasi kebutuhan layanan BPP di tingkat kecamatan
2. Mengidentifikasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam pembangunan pertanian dan sarana pendukung saat ini
3. Menganalisis senjang (gap) agar BPP dapat berfungsi dan peran sebagai basis pengelolaan pembangunan pertanian di kecamatan dalam kerangka kerja Kostratani
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan tugas, fungsi dan peran BPP dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan pertanian di kecamatan, mendukung gerakan dan program kostratani



METODOLOGI

Kerangka Pemikiran



Ruang Lingkup Kegiatan

- Penggalian data dan informasi difokuskan pada kondisi eksisting kelembagaan BPP :
 - (1) Tugas, fungsi, peran dan kinerja BPP dalam memberikan layanan, ketersediaan dan potensi SDM, sarana prasarana, manajemen dan regulasi yang terkait kelembagaan BPP
 - (2) Kegiatan penelitian juga mencakup deskripsi data dan informasi tentang rancangan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian nasional melalui Komando Strategis Pertanian (kostratan), terutama di tingkat BPP/kecamatan (Kostratani)
 - (3) Menganalisis kesenjangan antara kondisi eksisting BPP dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dalam memberikan layanan dengan kebutuhan pengguna/mitra serta kesenjangan antara kondisi eksisting BPP dengan proses pelaksanaan program kostratani, dimana BPP menjadi pusat kegiatan program pembangunan pertanian di kecamatan.



Lokasi Penelitian dan Responden

Dasar Pemilihan Lokasi

- Pemilihan lokasi BPP didasarkan pada tingkat keterwakilan atas keragaman wilayah agroekosistem dan komoditas pangan serta komoditas lain.
- Pemilihan lokasi BPP juga mempertimbangkan keterwakilan tentang kondisi masing-masing BPP, diantaranya lokasi BPP yang ditunjuk BPPSDMP menjadi model transformasi kostratani dan BPP yang bukan model serta dengan kondisi dan aksesibilitas berbeda.
- Penetapan lokasi BPP → hasil diskusi dan verifikasi Tim dengan pejabat Dinas Pertanian yang membidangi kelembagaan/kegiatan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten serta informasi yang diperoleh sebelumnya dari hasil diskusi dengan Tim BPPSDMP Kementan sebagai penanggungjawab program dan gerakan nasional kostratani.

Responden

Fokus utama BPP; Koordinator dan SDM penyuluh, mitra BPP, para pemangku kepentingan terkait dengan struktur keorganisasian BPP dan program pembangunan pertanian strategis kostratani.



Lokasi Penelitian

- Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah serta Lampung.
- Masing-masing provinsi Jabar dan Jateng dipilih 3 (tiga) Kabupaten dan di provinsi Lampung, dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten.
- Lokasi penelitian BPP di Jawa Barat, di Kabupaten Subang, Indramayu dan Kuningan; Lokasi BPP di Jawa Tengah, di kabupaten Grobogan, Magelang dan Banjarnegara; Lokasi BPP di Provinsi Lampung ; Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
- Lokasi Jabar dan Lampung masing-masing kabupaten ditetapkan 2 (dua) lokasi BPP, dimana salahsatunya BPP yang ditunjuk menjadi model transformasi Kostratani. Penetapan lokasi BPP di 3 (tiga) kabupaten di provinsi Jawa Tengah, dipertimbangkan berdasarkan keterwakilan agroekosistem dan keragaman komoditas strategis yang menjadi basis kegiatan di masing-masing wilayah/BPP.



Lokasi Penelitian

No	Provinsi	Kabupaten	Lokasi BPP/Kecamatan	Agroekosistem/Komoditas
1	Jawa Barat	Subang	Patokbeusi*	Sawah/Padi
			Dawuan	Sawah/Padi
		Indramayu	Gantar*	Sawah/Padi
			Krangkeng	Sawah/Padi
		Kuningan	Ciawigebang*	Sawah/Padi
			Darma	Sawah/Padi
2	Jawa Tengah	Grobogan	Pulokulon	Sawah/Padi-Palawija
			Tegowanu **	Sawah/Padi-Palawija
		Magelang	Tegalrejo	Sawah/Padi-Palawija
			Ngablak	Dataran Tinggi/Horti-Sayuran
		Banjarnegara	Bawang	Sawah/Padi
			Batur	Dataran Tinggi/Sayur-horti-Ternak
3	Lampung	Lampung Tengah	Seputihraman*	Sawah/Padi-jagung
			Punggur	Sawah/Padi
		Lampung Selatan	Candipuro*	Sawah/Padi
			Rajabasa	Campuran/Perkebunan-padi-sayur



Responden

No	Responden	Lokasi dan Jumlah Responden (orang)				Jumlah
		Pusat	Jabar	Jateng	Lampung	
1.	Kementerian Desa	2				2
2.	Kementerian Dalam Negeri	3				3
3.	BBPSDMP/Pusluhtan	2				2
4.	Badan Karantina Pertanian	1				1
5.	Ditjen Hortikultura	2				2
6.	Ditjen Tanaman Pangan	1				1
7.	Ditjen Perkebunan	1				1
8.	Ditjen Peternakan	2				2
9.	Dinas Pertanian Provinsi		4	3	2	9
10.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian		2	3	3	8
11.	Balai Pelatihan Pertanian Provinsi		3	-	2	5
12.	Dinas Pertanian Kabupaten		6	6	4	16
13.	BPP/Koordinator BPP		6	6	4	16
14.	Penyuluh/SDM BPP		51	31	31	113
15.	Kelompok Tani		13	13	6	32
16.	Petani		11	16	8	35
17.	Pedagang Komoditas Pertanian		8	5	4	17
18.	Koordinator Jafung		4	3	3	10
	Jumlah	14	107	86	67	274



Data dan Metode Analisis

Jenis dan Sumber Data

Data	Jenis Data	Sumber Data
Primer	<ul style="list-style-type: none">Layanan BPP,Tugas, Fungsi dan Peran	<ul style="list-style-type: none">BPP Koordinator BPP,Penyuluh,Petani,Kelompok Tani,Pedagang
	<ul style="list-style-type: none">Kinerja dan Perkembangan BPP	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pertanian ProvinsiDinas Pertanian KabupatenBPPSDMP dan PUSLUHTAN
	<ul style="list-style-type: none">SDM, Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">BPP, Koordinator BPPDinas Pertanian Kabupaten
	<ul style="list-style-type: none">Kostratan, Kostratanas, Kostrawil, Kostrada, KostrataniProgram pembangunan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">BPPSDMP, Dinas Pertanian Provinsi, BPTP, Dinas Pertanian KabupatenDitjen Teknis Esselon 1 dan Sekjen lingkup Kementan
Sekunder	Data dan Informasi terkait penelitian	SIMLUHTAN, BPPSDMP, KEMENDES, KEMENDAGRI, Dinas Pertanian Provinsi, BPTP, Dinas Pertanian Kabupaten



Metode Analisis

Tujuan satu : Mengidentifikasi kebutuhan layanan pertanian di tingkat kecamatan, menggunakan kombinasi data primer, data sekunder dan hasil review, disampaikan dalam bentuk tabulasi sederhana dan dianalisis secara deskriptif.

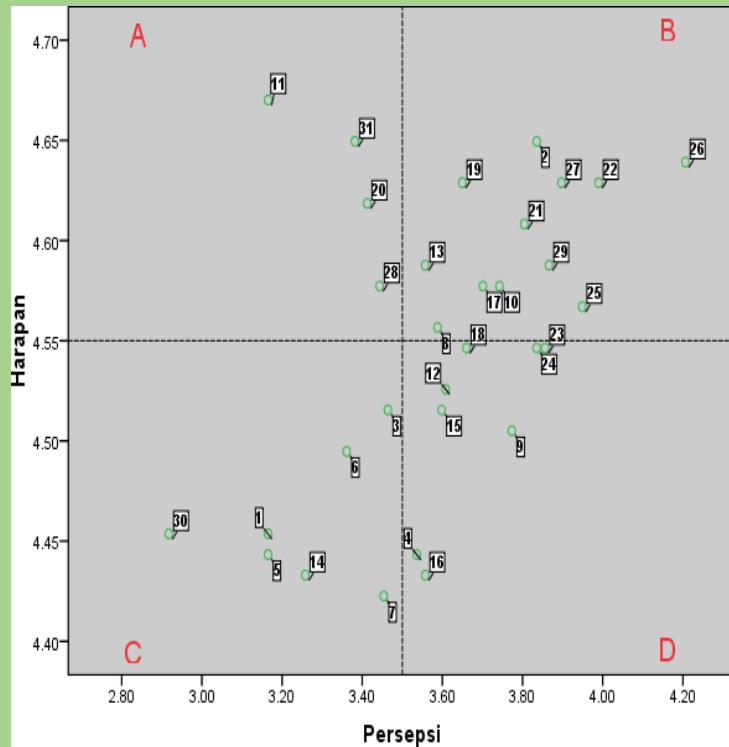
Tujuan dua : Melakukan identifikasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam pembangunan pertanian dan sarana pendukungnya saat ini, menggunakan data primer dan data sekunder yang diolah dengan tabulasi sederhana dan dianalisis secara deskriptif.

Tujuan tiga : Menganalisis kesenjangan agar BPP dapat berfungsi dan berperan sebagai basis pengelolaan pembangunan pertanian di kecamatan dalam kerangka kerja Kostratani, menggunakan *Importance Performance Analysis* dan Diagram Kartesius, → Harianja at al (2015), untuk mengetahui kemungkinan adanya kesenjangan antara persepsi dan harapan penyuluh.



Importance Performance Analysis

Grafik Kartesius



Penjelasan Kuadran

1. Kuadran A (*Concentrate Here*)

- Kuadran A menunjukkan peubah-peubah indikator yang mempengaruhi kepuasan penyuluh yang penanganannya perlu diprioritaskan.

2. Kuadran B (*Keep Up The Good Work*)

- Kuadran B menunjukkan peubah-peubah indikator tersebut baik dan wajib untuk dipertahankan karena menurut penyuluh, BPP dan dinas telah melaksanakan peubah-peubah indikator tersebut, sehingga menjadi keunggulan bagi penyuluh.

3. Kuadran C (*Low Priority*)

- Kuadran C menunjukkan peubah-peubah indikator yang bukan prioritas sehingga tidak diprioritaskan bagi kegiatan penyuluhan oleh BPP dan dinas.

4. Kuadran D (*Possible Overskill*)

- Kuadran D menunjukkan peubah-peubah indikator yang dianggap kurang penting bagi penyuluh.

Customer Satisfaction Index

Pengukuran tingkat kepuasan penyuluh → mengetahui seberapa besar harapan yang dapat dipenuhi oleh pelayanan BPP. Perhitungan *Customer Satisfaction Index* menggunakan skor harapan dan skor persepsi dari masing-masing variabel indikator dengan menghitung *Weight Factor* → didapatkan total *Weight Factor* 100% dan *Weight Score* masing-masing indikator.



SINTESA HASIL

1. Kebutuhan Layanan BPP di Tingkat Kecamatan

Gambaran Nasional dan Provinsi Penelitian berdasarkan Jumlah BPP, Ketenagaan, Jumlah Desa dan Kelompok Tani (Data 30 Desember 2020)

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah BPP	Jumlah Petugas BPP (PPL Pertanian)			Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani
					PP-PNS	PP THL-TBPP	Jumlah	BPS 2019	
1	Jawa Barat	27	627	491	1371	989	2360	5957	51416
2	Jawa Tengah	35	576	553	1863	1686	3549	8562	57246
3	Lampung	38	666	589	1992	1680	3672	8496	47014
4	Nasional	514	7260	5744	25707	11749	37456	76145	646602

- 1. Merespon Kebutuhan Pengguna atau Mitra BPP*
- 2. Melaksanakan Programa dan Program Penyuluhan BPP*
- 3. Melaksanakan Program Pembangunan Pertanian Nasional*
- 4. Sumber Inovasi dan Informasi*
- 5. Kendala dan Permasalahan*



2. Tugas, Fungsi dan Peran BPP dalam Pembangunan Pertanian

Implementasi Tugas dan Fungsi BPP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian

No.	Tugas dan Fungsi BPP	Kondisi Eksisting/ Implementasi/Pelaksanaan (Dalam (%))
1	Menyusun program Penyuluhan Pertanian Kecamatan, sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota	100
2	Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian	100
3	Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan Pasar	100
4	Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha	100
5	Peningkatan kapasitas PPL PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan	93,75
6	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha	93,75
7	Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes)	100
8	Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama dan pelaku usaha	100
9	Melaksanakan Fungsi BPP :	
	a. Sebagai Tempat Pertemuan Para Penyuluh Pertanian, Pelaku Usaha	100
	b. Sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan	81,25

Sumber : Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor : 03/KPTS/SM.200/I/05/2019
Data Primer (2021), diolah



Konidisi Jumlah Desa, Jumlah PPL dan Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Lokasi BPP (2021)

No	Lokasi	BPP	Jumlah Desa	Jumlah PPL	Jumlah Kelompok Tani
1	Jawa Barat				
	Subang	Patokbeusi	10	7	94
		Dawuan	10	7	88
	Indramayu	Gantar	7	6	142
		Krangkeng	11	6	58
	Kuningan	Ciawigebang	24	18	148
		Darma	26	18	161
2	Jawa Tengah				
	Grobogan	Pulokulon	13	3	145
		Tegowanu	18	4	62
	Magelang	Tegalrejo	21	10	132
		Ngablak	16	9	133
	Banjarnegara	Bawang	18	8	160
		Batur	8	5	135
3	Lampung				
	Lampung Tengah	Seputihraman	14	11	196
		Punggur	9	8	141
	Lampung Selatan	Candipuro	14	8	324
		Rajabasa	16	5	83



Kapasitas BPP berdasarkan implementasi tugas dan fungsi model BPP Kostratani di lokasi penelitian

No	Tugas dan Fungsi BPP		BPP yang melaksanakan tugas dan fungsi			
			Jateng	Jabar	Lampung	Total
1.	Pusat data dan informasi pertanian	Pengumpulan data dan informasi	100	100	100	100
		Verifikasi data	100	100	100	100
		Validasi data	100	100	100	100
		Unggah data (lap. Utama pemb. Pert, simluhtan, cyber extension, E RDKK)	100	100	100	100
2.	Pusat gerakan pembangunan pertanian	Perencanaan pembangunan pertanian di kecamatan (Programa penyuluhan, potensi wilayah/pemetaan CPCL, CPCL dlm simluhtan, usulan CPCL)	100	100	100	100
		Pelaksanaan kegiatan (distribusi CPCL yg sdh ditetapkan kpd penyuluh di wilker)	100	100	100	100
3.	Pusat pembelajaran (kursus tani, SL, demplot)	Perencanaan: Kebutuhan belajar, tujuan belajar, materi & sarana, jadwal, lokasi, CP/CP, fasilitator	50	100	75	75
		Pelaksanaan	50	100	75	75
		Evaluasi dan bimbingan lanjutan	50	67	50	56
4.	Pusat konsultasi agribisnis	Perencanaan: mengumpulkan info, mempersiapkan konten, memilih metode off/on line, penjadwalan rutin	67	83	75	75
		Pelaksanaan: off line/on line	67	67	75	69
		Evaluasi: instrument & pelaksanaan evaluasi, laporan	50	67	25	50
5.	Pusat pengembangan jejaring kemitraan	Perencanaan: identifikasi dan inventarisasi jenis usaha dan komoditas pelaku utama, identifikasi mitra usaha, kerjasama/kemitraan, pengembangan jejaring kemitraan	100	67	75	81
		Pelaksanaan: fasilitasi temu bisnis/temu usaha (MoU), membahas aspek kerjasama, menyepakati aspek kerjasama, menandatangani berita acara kerjasama, pendampingan oleh kedua belah pihak	100	17	50	56
		Evaluasi: menyiapkan instrument evaluasi, melaksanakan evaluasi, menyusun laporan evaluasi	100	33	25	56



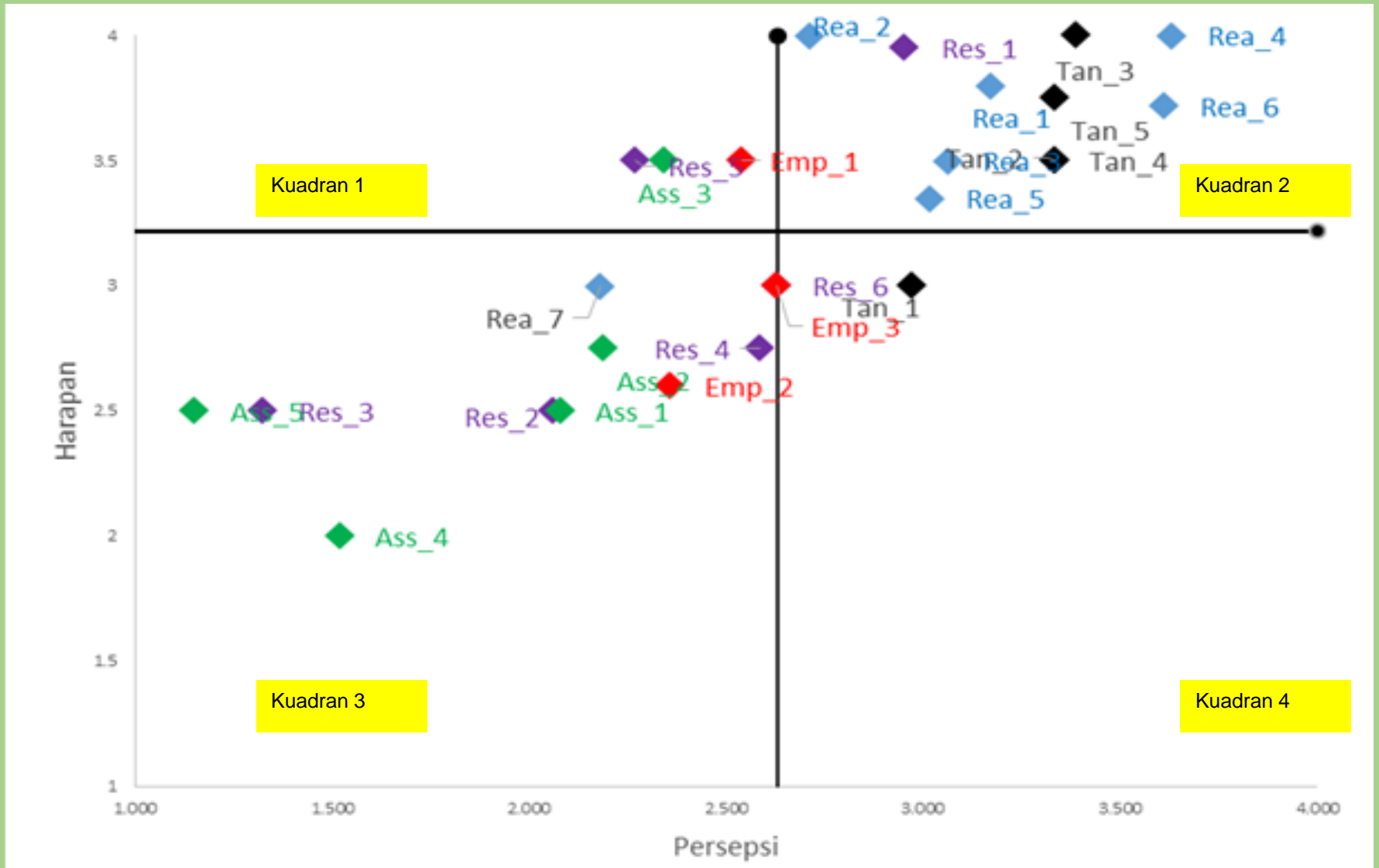
3. Kesenjangan Tugas, Fungsi dan Peran BPP serta dalam Kerangka Kerja Kostratani

Perhitungan *Service Quality* dengan *Importance Performance Analysis*

No.	Peubah	Kode	Indikator	Persepsi	Harapan	GAP
	Tangible	Tan_1	Ketersediaan informasi di BPP (leaflet/buku teknis)	2,97	3,00	-0,03
1	Tangible	Tan_2	Kenyamanan dan kebersihan ruangan	3,33	3,50	-0,17
	Tangible	Tan_3	Fasilitas BPP (meja, kursi, komputer, in focus dan lain lain)	3,39	4,00	-0,61
	Tangible	Tan_4	Ketersediaan alat tulis kantor	3,33	3,50	-0,17
	Tangible	Tan_5	Kelayakan bangunan BPP	3,33	3,75	-0,42
	Reliability	Rel_1	Kemampuan penyuluh dalam membina kelompok tani	3,17	3,80	-0,63
2	Reliability	Rel_2	Pelayanan penyuluh dengan teknologi modern	2,71	4,00	-1,29
	Reliability	Rel_3	Kemudahan penyuluh dalam menemui kelompok tani (aksesibilitas)	3,06	3,50	-0,44
	Reliability	Rel_4	Beban kerja penyuluh dalam membina kelompok tani	3,63	4,00	-0,37
	Reliability	Rel_5	Ketersediaan materi penyuluhan	3,02	3,35	-0,33
	Reliability	Rel_6	Kejelasan tugas dan fungsi penyuluh	3,61	3,72	-0,11
	Reliability	Rel_7	Fasilitas kegiatan penyuluhan	2,18	3,00	-0,82
	Responsiveness	Res_1	Sosialisasi terhadap program Kostratani	2,95	3,95	-1,00
3	Responsiveness	Res_2	Pelatihan terhadap penggunaan alsintan yang baru	2,06	2,50	-0,44
	Responsiveness	Res_3	Ketersediaan insentif dalam mengawal program Kostratani	1,32	2,50	-1,18
	Responsiveness	Res_4	Kelogisan dalam pencapaian target program baru	2,59	2,75	-0,16
	Responsiveness	Res_5	Akses penyuluh terhadap jenis aplikasi on-line pendukung sumber data dan informasi	2,27	3,50	-1,23
	Responsiveness	Res_6	Kejelasan tanggung jawab masing-masing penyuluh terhadap program Kostratani	2,63	3,00	-0,37
	Assurance	Ass_1	Kemudahan mengikuti kegiatan pelatihan	2,08	2,50	-0,42
4	Assurance	Ass_2	Kemudahan yang diperoleh penyuluh	2,19	2,75	-0,56
	Assurance	Ass_3	Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada program Kostratani	2,34	3,50	-1,16
	Assurance	Ass_4	Penyuluh dapat mengakses hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	1,52	2,00	-0,48
	Assurance	Ass_5	Pendanaan Kostratani	1,15	2,50	-1,35
	Emphaty	Emp_1	Kebijakan dinas yang mendukung kegiatan penyuluhan	2,54	3,50	-0,96
5	Emphaty	Emp_2	Kejelasan koordinasi antara dinas dengan BPP	2,36	2,60	-0,24
	Emphaty	Emp_3	Membangun pusat pengembangan jejaring kemitraan dengan meningkatkan aksesibilitas penyuluh	2,63	3,00	-0,37
	Jumlah				68,40	83,67
Rata-Rata				2,63	3,22	-0,59



Diagram Kartesius Persepsi dan Harapan



Hasil Analisis dan Penetapan Indikator berdasarkan Pembagian Kuadran

Kluster/Kuadran	Variabel	Indikator
1	Res_5	Akses penyuluh terhadap jenis aplikasi on-line pendukung sumber data dan informasi
1	Ass_3	Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada program Kostratani
1	Emp_1	Kebijakan dinas yang mendukung kegiatan penyuluhan
2	Tan_2	Kenyamanan dan kebersihan ruangan
2	Tan_3	Fasilitas BPP (meja, kursi, komputer, in focus dan lain lain)
2	Tan_4	Ketersediaan alat tulis kantor (ATK)
2	Tan_5	Kelayakan Bangunan BPP
2	Rea_1	Kemampuan penyuluh dalam membina kelompok tani
2	Rea_2	Pelayanan penyuluh dengan teknologi modern
2	Rea_3	Kemudahan penyuluh dalam menemui kelompok tani (aksesibilitas)
2	Rea_4	Beban kerja penyuluh dalam membina kelompok tani
2	Rea_5	Ketersediaan materi penyuluhan
2	Rea_6	Kejelasan tugas dan fungsi penyuluh
2	Res_1	Sosialisasi terhadap program Kostratani
3	Rea_7	Fasilitas kegiatan penyuluhan
3	Res_2	Pelatihan terhadap penggunaan alsintan yang baru
3	Res_3	Ketersediaan insentif dalam mengawal program Kostratani
3	Res_4	Kelogisan dalam pencapaian target program baru
3	Ass_1	Kemudahan mengikuti kegiatan pelatihan
3	Ass_2	Kemudahan yang diperoleh penyuluh
3	Ass_4	Penyuluh dapat mengakses hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
3	Ass_5	Pendanaan Kostratani
3	Emp_2	Kejelasan koordinasi antara dinas dengan BPP
4	Tan_1	Ketersediaan informasi di BPP (leaflet/buku teknis)
4	Res_6	Kejelasan tanggung jawab masing-masing penyuluh terhadap program Kostratani
4	Emp_3	Membangun pusat pengembangan jejaring kemitraan dengan meningkatkan aksesibilitas penyuluh



Hasil Perhitungan *Customer Satisfaction Index*

No	Skor Harapan	Weigh Factor	Skor Persepsi	Weigh Score
1	3.00	0.04	2.97	0.11
2	3.50	0.04	3.33	0.14
3	4.00	0.05	3.39	0.16
4	3.50	0.04	3.33	0.14
5	3.75	0.04	3.33	0.15
6	3.80	0.05	3.17	0.14
7	4.00	0.05	2.71	0.13
8	3.50	0.04	3.06	0.13
9	4.00	0.05	3.63	0.17
10	3.35	0.04	3.02	0.12
11	3.72	0.04	3.61	0.16
12	3.00	0.04	2.18	0.08
13	3.95	0.05	2.95	0.14
14	2.50	0.03	2.06	0.06
15	2.50	0.03	1.32	0.04
16	2.75	0.03	2.59	0.08
17	3.50	0.04	2.27	0.09
18	3.00	0.04	2.63	0.09
19	2.50	0.03	2.08	0.06
20	2.75	0.03	2.19	0.07
21	3.50	0.04	2.34	0.10
22	2.00	0.02	1.52	0.04
23	2.50	0.03	1.15	0.03
24	3.50	0.04	2.54	0.11
25	2.60	0.03	2.36	0.07
26	3.00	0.04	2.63	0.09
Total	83.67	1.00	68.40	2.72
Weight Total (WT) = 2.72				
Customer Satisfaction Index			68.09	



Customer Satisfaction Index

Hasil perhitungan *Customer Satisfaction Index*, diperoleh nilai *Weight Total* 2,72

maka hasil perhitungan *Customer Satisfaction Index* adalah sebesar 0,68 atau 68,09%.

Simamora (2005), dari hasil perhitungan skala numerik rentang skala (RS) maka kriteria kepuasannya mempunyai nilai skala 20, dengan interval kepuasan yang diperoleh, sebagai berikut :

- (1) $0\% < \text{CSI} \leq 20\%$ = Sangat tidak puas ;
- (2) $20\% < \text{CSI} \leq 40\%$ = Tidak puas;
- (3) $40\% < \text{CSI} \leq 60\%$ = Cukup puas ;
- (4) $60\% < \text{CSI} \leq 80\%$ = Puas;
- (5) $80\% < \text{CSI} \leq 100\%$ = Sangat puas.

Indeks kepuasan pada penelitian ini menunjukkan nilai *Weight Total* (WT) = 2,72 dan nilai *Customer Satisfaction Index* 68,09, berada pada interval 0,61 – 0,80

Secara keseluruhan penyuluh berada dalam kategori puas berdasarkan indikator pada peubah dimensi layanan terhadap kualitas pelayanan di BPP.

Nilai 68,09% menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penyuluh tersebut masih belum optimal, sehingga masih harus mendapatkan perhatian untuk terus ditingkatkan atau dibenahi melalui system pengelolaan BPP secara keseluruhan, meliputi peningkatan kompetensi SDM, ketersediaan sarana prasarana pendukung serta dukungan manajemen anggaran kegiatan BPP dari Pemerintah Daerah atau melalui Dinas Pertanian terkait.



Strategi Mewujudkan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan

- **Optimalisasi Tugas dan Peran Institusi Pembina BPP**

No	Unit Kementan	Jumlah UK/UPT	Jumlah BPP Binaan	Keterangan
1	Badan PPSDMP	24	54	Nasional
2	Badan Karantina Pertanian	55	115	Nasional
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	63	130	Nasional
	Jumlah	142	299	

Sumber : Pusluhtan, 2020

- **Penguatan Koordinasi dan Sinergi Program Lingkup Internal Kementan dengan Kostratani**
- **Keselarasan Peraturan Pelaksanaan di Kementan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kemendes**



KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Kebutuhan layanan BPP di Tingkat Kecamatan adalah inovasi teknologi (teknis budidaya, proses pengolahan), konsultasi agribisnis (informasi peluang dan potensi berusaha tani), pengelolaan hasil, pemasaran dan harga produk komoditas pertanian, layanan data dan informasi yang terkait dengan program strategis pembangunan pertanian. Namun demikian belum semua layanan dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna.
2. Tugas, fungsi serta peran BPP pada kondisi eksisting telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Permentan Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019. Namun demikian pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dalam kerangka kerja kostratani belum sepenuhnya diimplementasikan, kecuali pada BPP yang sudah dirancang sebagai BPP model transformasi kostratani. Kendala dalam mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP, meliputi keterbatasan jumlah penyuluh dan penyuluh yang kompeten terhadap penggunaan IT, keterbatasan sarana-prasarana TIK, beban kerja petugas, manajemen administrasi dan anggaran.
3. Terdapat kesenjangan antara kondisi eksisting BPP terhadap tugas untuk melaksanakan kostratani yang ditunjukkan oleh nilai *Customer Satisfaction Index* sebesar 68,09%.



Implikasi Kebijakan

1. Sebagai upaya peningkatan layanan BPP di tingkat Kecamatan, diperlukan peningkatan jenis dan jumlah inovasi dan teknologi berproduksi/budi daya dan pascapanen, temu usaha antara petani/kelompok tani dengan pelaku bisnis produk pertanian, baik produk primer maupun olahan.
2. Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai simpul layanan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM penyuluh melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi dan dukungan anggaran operasional yang memadai.
3. Untuk meningkatkan peran dan kemanfaatan BPP dalam kerangka pelaksanaan kostratani, diperlukan kebijakan yang terkait dengan akses penyuluh terhadap jenis aplikasi *on-line* pendukung sumber data dan informasi; kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada program Kostratani; serta kebijakan dinas yang mendukung kegiatan penyuluhan. Selain itu, kebijakan lain yang diperlukan adalah fasilitas dan kelayakan serta kenyamanan kantor BPP, kemudahan penyuluh dalam membina kelompok serta sosialisasi program Kostratani secara lebih intensif.







Terima kasih.....



Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id